



Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Multi Dimensional Poverty and Human Development Index in Indonesia

Mirza Fuady¹, M Rafi Farrel Fuady² dan Fahmi Aulia²

Diterima: 21 Januari 2021

Disetujui: 17 Februari 2021

Abstrak: Persoalan kemiskinan menjadi masalah yang umum terjadi di hampir semua negara termasuk Indonesia. Hasil kajian beberapa penelitian menunjukkan persoalan kemiskinan akan berhubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Dimana menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah akan berdampak negatif naiknya tingkat kemiskinan, begitupula sebaliknya. Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat, namun angka kemiskinan tidak signifikan turun. Karenanya studi ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi deskriptif ini memakai metode kualitatif dimana dilakukan pengumpulan dan analisis data terkait pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan pada beberapa wilayah di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai rujukan untuk memahami hubungan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dari studi ini diperoleh hasil bahwa meskipun indeks pembangunan manusia dan angka pertumbuhan ekonomi semakin baik, namun masih banyak indikator kemiskinan di Indonesia yang belum membaik. Hal tersebut berdampak lambatnya proses menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan diharapkan dapat mengatasi kekurangan tersebut dan mendukung terciptanya kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah Indonesia.

Kata kunci: Pembangunan Manusia, Kemiskinan Multidimensi, Pengukuran Kemiskinan

Abstract: The problem of poverty is a common problem in almost all countries, including Indonesia. The results of several studies show that the problem of poverty will be related to conditions of economic growth and the quality of human resources. Where the decline in economic growth and the quality of human resources in an area will have a negative impact on increasing poverty levels, and vice versa. Based on data from BPS, it is known that the index of human development and economic growth in Indonesia continues to increase, but the poverty rate does not decrease significantly. Therefore, this study was made with the aim of identifying and describing the relationship between human development index and economic growth with poverty. This descriptive study uses a qualitative method where data is collected and analyzed related to economic growth, human development index and poverty in several regions in Indonesia and then used it as a reference to understand the relationship between human development index and economic growth with poverty in Indonesia. From this study, it is found that although the human development index and economic growth rates are getting better, there are still many poverty indicators in Indonesia that have not improved. This has resulted in the slow process of reducing poverty in Indonesia. For this reason, a multidimensional approach in measuring poverty is

¹ Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

² Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

expected to be able to overcome these deficiencies and support the creation of better policies in overcoming the problem of poverty in the territory of Indonesia.

Keywords: Human Development, Multidimensional Poverty, Poverty Measurement

PENDAHULUAN

Kemiskinan umumnya masih diukur dengan pendekatan tunggal moneter atau pendapatan. Metode ini dianggap belum bisa mengurai kemiskinan secara menyeluruh sebab kompleksitas kemiskinan tidak hanya pada turunnya pendapatan (Prakarsa, 2020a). Seharusnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti standar hidup yang layak, pendidikan, dan kesehatan, menjadi gambaran utama dalam mengukur kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa ditafsirkan secara sederhana namun butuh pendekatan secara multidimensi untuk memahami fenomenanya. Untuk itu pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan multidimensi menjadi pilihan yang lebih bijak sehingga sasaran untuk mencapai turunnya angka kemiskinan bisa dicapai secara efektif.

Hal tersebut sejalan pendapat Suryawati (2005), yang menyatakan bahwa pembangunan yang berlangsung saat ini tidak mampu meredam bertambahnya jumlah penduduk miskin di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Kenyataan ini menunjukkan perumusan dan penerapan kebijakan untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemampuan penduduk miskin belum sepenuhnya tepat. Umumnya kebijakan mengenai kemiskinan hanya mengkaji dimensi ekonomi dengan pertimbangan bahwa dimensi ekonomi yang paling mudah dipelajari dan dianalisis. Fakta menunjukkan kemiskinan juga berhubungan dengan dimensi lain seperti dimensi sosial, politik, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, agama, dan perilaku. Memahami kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut mutlak diperlukan agar tujuan perumusan kebijakan menurunkan kemiskinan dapat cepat tercapai.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala telah melakukan pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan moneter berupa garis kemiskinan makanan dan nonmakanan sebagai penentu titik potong yang membagi penduduk antara miskin dan tidak miskin (Kristianto & Prasetya, 2017). Hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan tingginya jumlah penduduk yang tergolong miskin dan berada dalam kategori mengalami kemiskinan moneter. Meski pengukuran dengan pendekatan dimensi moneter secara tunggal sudah memperoleh hasil yang baik dalam mengukur kemiskinan, namun pendekatan tersebut belum dapat menangkap semua aspek kesejahteraan.

Selain persoalan diatas, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi juga harus menjadi pokok perhatian. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan sulitnya pencapaian kesejahteraan serta turunnya angka kemiskinan sebagai tujuan pembangunan ekonomi (Safuridar & Putri, 2019). Tingginya angka pertumbuhan penduduk dikhawatirkan dapat berdampak buruk berupa terkurasnya sumber daya dan rusaknya lingkungan, yang nantinya dapat memunculkan masalah sosial baru, seperti kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Demikian pula mutu sumber daya manusia pada suatu wilayah bisa juga termasuk sebab timbulnya kemiskinan. Rendahnya mutu sumber daya manusia sebagaimana ditunjukkan pada laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah, akan berdampak pada turunnya tingkat produktivitas kerja masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya turunnya produktivitas akan berdampak pada kecilnya pendapatan yang diperoleh, hingga dapat menyebabkan masyarakat jatuh miskin.

Merujuk data dari BPS dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terus terjadi peningkatan jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2020a). Demikianpula indeks pembangunan manusia dan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga terus meningkat (BPS, 2020b), namun angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Karenanya yang menjadi rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Indonesia.

METODE

Studi deskriptif ini memakai metode kualitatif dalam mengkaji berbagai pustaka terkait kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di beberapa wilayah di Indonesia dan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami hubungan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di Indonesia. Data kajian pustaka bersumber dari artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta sumber-sumber lain dari berbagai media terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Multidimensi di Indonesia

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya mencapai taraf yang manusiawi. Kemiskinan dapat juga dipahami sebagai kondisi tidak mampu yang dialami seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta perbaikan kondisi hidupnya (Baniadi, 2018). Sejatinya fenomena kemiskinan tidak hanya diukur dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar saja, namun juga berhubungan dengan beberapa kebutuhan lain dalam kehidupan seseorang, seperti kesehatan, peran sosial, pendidikan, dan jaminan masa depan.

Sejalan dengan itu, menurut Ningsih & Syechalad (2016) kemiskinan hendaknya tidak dilihat hanya sebagai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok, namun kemiskinan juga menyangkut peluang seseorang untuk mengembangkan taraf kehidupannya. Selanjutnya kompleksitas dimensi kemiskinan telah menjadikannya sebagai persoalan rumit membentuk perangkat kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan atau ketidakmampuan, kelemahan secara jasmani dan rohani, serta kerentanan. Kondisi ini menurut Fuady, Buraida, & Fuady, (2020), secara umum akan meningkatkan risiko dan turunnya ketahanan terhadap bencana.

Menurut Prakarsa (2020b) kemiskinan multidimensi merupakan tinjauan dari berbagai kekurangan atau deprivasi yang ada pada warga miskin dalam menjalani hidupnya, seperti standar hidup yang tidak layak, buruknya kondisi kesehatan, minimnya pendidikan, kondisi tidak berdaya, pekerjaan dengan kualitas buruk, serta lingkungan tempat tinggal yang berbahaya dan terancam oleh tindakan kekerasan. Kemiskinan multidimensi bisa diukur dengan memuat berbagai unsur yang mengindikasikan kerumitan fenomena hingga selanjutnya dapat menjadi dasar rumusan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan dan kelemahan di suatu wilayah. Indikator ini dapat dipilih sesuai konteks dan tujuan pengukuran, untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas wilayah tersebut.

Studi mengenai kemiskinan multidimensi di Indonesia sudah dibuat oleh banyak kelompok peneliti. Sebagian diantara penelitian tersebut menyajikan laporan analisis yang menghitung Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2018 (Prakarsa, 2020b). Laporan tersebut juga memaparkan profil kemiskinan multidimensi baik secara nasional maupun dalam lingkup provinsi untuk

setiap wilayah di Indonesia. Profil kemiskinan yang dianalisis meliputi tingkat keparahan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, serta indeks kemiskinan multidimensi.

Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian tersebut pada dimensi kesehatan adalah pada ketersediaan air minum yang layak, sanitasi, serta keseimbangan gizi pada balita. Untuk dimensi pendidikan, dipakai indikator keberlanjutan sekolah dan keikutsertaan pendidikan prasekolah. Sedangkan untuk dimensi standar hidup, digunakan indikator jenis sumber penerangan, ketersediaan bahan bakar yang digunakan untuk memasak serta penilaian kondisi atap dan dinding, serta lantai tempat tinggal.

Diungkapkan dalam laporan tersebut bahwa persoalan sanitasi, akses mendapatkan air minum dan tersedianya jenis bahan bakar tertentu untuk memasak merupakan indikator penting penyumbang kemiskinan multidimensi. Begitu pula indikator asupan gizi balita, dan keberlanjutan sekolah atau tidak pernah sekolah serta keikutsertaan pendidikan prasekolah yang meningkat di tiap tahunnya.

Laporan tersebut juga menyatakan terdapat kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi pada periode tahun 2015–2018 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2012–2014. Pada periode tahun 2015–2018, hasil analisis menyatakan bahwa di tahun 2015, terdapat lebih dari 34 juta penduduk miskin multidimensi atau berkisar 13,53 persen terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi mencapai 21,5 juta orang atau berkisar 8,17 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Menurunnya jumlah kemiskinan di Indonesia secara multidimensi juga berkaitan dengan adanya program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dan adanya peningkatan jumlah anggaran perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang ikut mempercepat turunnya angka kemiskinan. Pemerataan program sosial yang dijalankan oleh pemerintah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti terlihat dalam peningkatan jumlah rumah tangga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan adanya program seperti perumahan rakyat dan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, yang memperbaiki prasarana dasar lingkungan secara progresif (Prakarsa, 2020b).

Menurut Wahyuningsih & Zamzami (2014), Provinsi Aceh merupakan wilayah di Pulau Sumatera yang dinilai tertinggi tingkat kemiskinannya. Data kemiskinan di Aceh tahun 2014, menunjukkan angka 18,05 persen yang merupakan nilai cukup tinggi melebihi angka kemiskinan rata-rata secara nasional yaitu 12,25 persen. Namun meski tergolong tinggi, angka kemiskinan di Aceh mengalami perubahan secara signifikan dari 28,7 persen di tahun 2006 turun jadi 18,05 persen di tahun 2014.

Sejalan dengan itu menurut Prakarsa (2020b), dalam rentang waktu tahun 2015 sampai tahun 2018 kemiskinan multidimensi dalam provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Dari data tahun 2015 diketahui Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) di desa dan kota memperlihatkan angka 13,70 persen, sementara pada tahun 2018 memperlihatkan angka 7,30 persen. Turunnya Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) di Aceh yaitu sesilih 6,40 persen, sebanding dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin sekitar 300 ribu orang. Sampai dengan tahun 2018, dari jumlah keseluruhan penduduk miskin secara multidimensi yaitu sekitar 384 ribu, mengalami kondisi kekurangan dalam ketersediaan air minum yang merupakan indikator paling menonjol yaitu sebesar 331 ribu jiwa atau sekitar 86,28 persen. Secara nasional, data pada tahun 2018 memperlihatkan kecenderungan turunnya angka kemiskinan ini membuat provinsi Aceh berada di urutan 24 dari 34 provinsi dengan nilai 0,027.

Sementara itu hasil analisis AKM Provinsi Aceh terlihat lebih kecil dibanding angka kemiskinan moneter (lihat Gambar 1). Meskipun pada tahun 2018, terdapat dua digit angka kemiskinan moneter, sementara AKM hanya satu digit, nilai ini melebihi angka rata-

rata secara nasional. Keadaan tersebut memperlihatkan kondisi masyarakat yang miskin dalam hal pendapatan, tidak lebih baik jika ditimbang secara rata-rata nasional. Kondisi ini juga menunjukkan adanya permasalahan kemiskinan secara multi dimensi sebab masih banyak masyarakat miskin yang sulit memperoleh haknya untuk mendapatkan standar hidup yang layak, layanan kesehatan serta pendidikan.

	Angka Kemiskinan Multidimensi (%)	Angka Kemiskinan Moneter (%)
2015	13,70	17,10
2016	11,24	16,58
2017	8,32	16,41
2018	7,30	15,83

Sumber: Prakarsa, 2020b

Gambar 1. Perbandingan AKM dan Angka Kemiskinan Moneter di Provinsi Aceh

Gambar 1 memperlihatkan nilai AKM turun secara signifikan bila dibanding angka kemiskinan moneter. Selama periode waktu tahun 2015 sampai tahun 2018, AKM turun sebesar 6,40 persen sedangkan angka kemiskinan moneter turun hanya sebesar 1,27 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat miskin membaik secara lebih cepat kondisinya dalam hal standar hidup, pendidikan dan kesehatan, sementara dalam hal pendapatan kondisinya membaik secara perlahan (Prakarsa, 2020b).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Soleh (2012) pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan suatu wilayah, memiliki sasaran paling penting dengan adanya kegiatan pembangunan yaitu turunnya angka kemiskinan, yang akan dicapai dengan terjadinya redistribusi pendapatan. Dalam kegiatan nyata, pertumbuhan ekonomi dapat juga dilihat sebagai perkembangan ekonomi secara fisik, berupa terjadinya peningkatan dalam produksi barang dan jasa, serta berlangsungnya pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah. Sejalan dengan itu, menurut Dewi (2017) kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut umumnya dapat dinilai dari peningkatan pendapatan riil yang diperoleh suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan penilaian terhadap pembangunan sumber daya manusia menurut Setiawan & Hakim (2013), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit susunan dari tiga unsur yaitu standar hidup, pendidikan dan lama hidup. Selanjutnya menurut UNDP dalam Garibaldi & Hidayat (2014), pembangunan manusia dapat dilihat sebagai proses meluaskan pilihan penduduk terhadap anggapan tiga pilihan penting, yakni akses pada sumber daya mendapatkan pemenuhan standar untuk hidup layak (*living standard*), berpendidikan dan berpengetahuan (*knowledge*), serta peluang hidup sehat dan panjang umur (*longevity*). Adapun peluang hidup yang dinilai adalah didasarkan pada angka kehidupan saat lahir, sementara nilai pengetahuan didasarkan pada rerata lamanya bersekolah serta angka melek huruf dalam masyarakat yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, sedangkan hidup layak didasarkan pada pengeluaran per-kapita yang merujuk pada kemampuan atau daya beli.

Menurut Najmi (2019) Indeks Pembangunan Manusia merupakan padanan dengan Human Development Index (HDI) yang dapat juga dipakai untuk mengkategorikan apakah suatu negara masuk ke dalam negara berkembang, negara maju, ataupun

negara yang terkebelakang. Selanjutnya indeks ini dapat juga menjadi ukuran untuk meninjau dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas penduduknya.

Sementara itu, menurut Wahyuningsih & Zamzami (2014) pertumbuhan ekonomi bisa juga diamati mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dalam kurun waktu tertentu. Kondisi kemampuan suatu wilayah mengatur sumber daya alamnya juga dapat tergambarkan pada PDRB.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya terpengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor non ekonomi dan faktor ekonomi. Faktor non ekonomi meliputi faktor politik, sumber daya manusia serta administratif. Sementara faktor ekonomi mencakup tanah atau sumber daya alam, kemajuan teknologi, organisasi, dan akumulasi modal.

Kualitas sumber daya manusia pada suatu tempat dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia. Bila angka indeks pembangunan manusia semakin tinggi, dapat diketahui hasil pembangunan manusia oleh pemerintah semakin berhasil dan akan menjadi kunci pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan secara parsial adalah positif namun tidaklah signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa indeks pembangunan manusia saja belum bisa dijadikan pertimbangan dalam melihat tingkat kemiskinan.

Kaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Menurut Santoso, Hamzah, & Syechalad (2013) pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan mencapai kesejahteraan serta kemakmuran bagi penduduk. Untuk mencapainya, dengan kekuasaan yang dipunyainya pemerintah dapat membagi distribusi sumber daya dengan cara yang adil serta wajar kepada penduduk dalam semangat melayani. Untuk itu kepada penduduk yang memegang kedaulatan dibebani kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada negara sehingga mendukung terlaksananya tugas pemerintah serta terwujudnya kesejahteraan.

Adapun menurut Prasetyoningrum & Sukmawati (2018), tidak tercapainya kesejahteraan atau dengan kata lain terjadinya kemiskinan, dapat disebabkan oleh kekurangan pada faktor sumber daya manusia dan alam. Ketersediaan sumber daya alam dalam jumlah tertentu dapat memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tidak tersedianya sumber daya alam dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan kemiskinan. Hal ini disebabkan potensi sumber daya alam merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia.

Sementara itu dalam pengelolaan sumber daya alam juga sangat terpengaruh oleh kemampuan manusia dalam memproduksi. Kondisi penduduk dengan pendidikan yang rendah akan berakibat sulitnya perkembangan pengetahuan dan kecakapan teknik, serta rendahnya minat kegiatan wiraswata yang pada akhirnya dapat menyebabkan potensi sumber daya alam akan sia-sia, tidak berguna, dan sulit berkembang.

Selain itu, lemahnya sumber daya manusia juga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan. Penduduk yang tidak memiliki kecakapan akan sulit memperoleh pendapatan sehingga daya belinya akan terus turun hingga sulit menjauh dari kemiskinan. Kondisi ini dapat mempengaruhi merosotnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah hingga meluas dampaknya pada negara. Menurut Bappeda (2014) lemahnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi rendahnya indeks pembangunan manusia dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Santoso (dalam Garibaldi & Hidayat, 2014) rangkuman beberapa penelitian menjelaskan adanya hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan, namun hal ini tidak mutlak berlaku pada semua pengujian. Begitu pula

hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan, dimana jika nilai indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan maka dapat mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan berdasarkan asumsi variabel lainnya dapat dianggap konstan. Penurunan tingkat kemiskinan disebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

Kondisi diatas mengungkapkkan bahwa tidak mutlak pertumbuhan ekonomi akan dapat membawa perubahan langsung menghapus kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi tidak meratanya pembagian secara adil hasil pembangunan terhadap semua wilayah sehingga tingginya pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat atau hanya terjadi pada tempat tertentu saja. Sehingga terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat miskin, begitupula hasil pertumbuhan tersebut tidak dirasakan secara meluas oleh masyarakat umum. Pada kondisi ini, dampak pertumbuhan ekonomi cenderung seperti sisa air yang menetes secara perlahan ke masyarakat miskin setelah terlebih dahulu dirasakan oleh orang kaya.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia kecenderungannya secara umum meningkat di setiap tahun begitupula jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun di setiap tahunnya. Namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia serta menurunnya kemiskinan suatu daerah tidak mutlak menjamin tingginya kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut, kondisi ini memperlihatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi bukan pada kelompok masyarakat miskin.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya akan lebih maksimal berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi juga berlangsung dalam kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi hendaknya dapat merata dalam tiap golongan pendapatan, termasuk kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini secara nyata menunjukkan perlunya kepastian pertumbuhan ekonomi berlangsung melibatkan kelompok masyarakat miskin baik dalam sektor pertanian ataupun sektor padat karya yang lain. Demikianpula secara tidak langsung, kondisi ini menuntut upaya efektif pemerintah dalam meratakan sebaran pertumbuhan ekonomi.

Berlangsungnya pembangunan ekonomi dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi seringkali dihadapkan dengan pilihan sulit antara peningkatan pertumbuhan dengan pengurangan kemiskinan yang umumnya hanya diukur dari pendapatan. Sepatutnya pusat perhatian selama pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan juga dilakukan secara multidimensi terkait standar hidup layak, kebutuhan dasar kesehatan, serta pendidikan. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi serta rencana pembangunan yang tepat agar efektif dalam mengatasi kemiskinan multidimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baniadi, P. (2018). *Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta. [Skripsi]*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bappeda. (2014). *Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2013*. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
- BPS. (2020b). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- BPS. (2020a). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal JOM Fekon*, 4 (1), 870-882.
- Fuady, M., Buraida, & Fuady, M. R. (2020). Disaster Preparedness Collaboration Between Banda Aceh and Japan. *Proceeding The 10th Annual International Conference, 15-16 Oktober 2020*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Garibaldi, M., & Hidayat, P. (2014). Analisis Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2, 562-572.
- Kristianto, D., & Prasetya, B. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia. Working Paper October 2017*. <https://www.researchgate.net/publication/321298837>.
- Najmi, I. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora*, 3 (1), 36-47.
- Ningsih, F. A., & Syechalad, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 1 (2), 545-554.
- Prakarsa. (2020b). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Prakarsa. (2020a). *Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. Working Paper No. 01, Mei 2020*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2), 217-240.
- Safuridar, & Putri, N. I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3 (1), 34-46.
- Santoso, S. A., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9 (1), 18-26.
- Soleh, A. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Ekombis Review*, 197-209.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *JMPK* 8 (3), 121-129.
- Wahyuningsih, Y. E., & Zamzami. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1 (1), 39-47.